

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban perusahaan yang telah *go public* adalah membuat laporan tahunan berdasarkan standar umum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik (auditor) sebagai pihak independen. Hal ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) bernomor Kep-36/PM/2003 serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta yang bernomor Kep-306/BEJ/07-2004 dimana perusahaan yang telah *go public* harus melaporkan laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta telah melalui proses audit oleh akuntan publik (auditor). Pihak ketiga yang independen seperti auditor sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar dapat memeriksa kelayakan laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan yang telah diterbitkan dimaksudkan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Hal ini selaras dengan Undang-Undang No.5 tahun 2011, disebutkan bahwa jasa yang diberikan oleh akuntan publik (auditor) ialah jasa yang dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi serta mempunyai pengaruh yang luas pada zaman globalisasi dan mempunyai peran berarti guna membantu menciptakan ekonomi nasional yang efektif dan sehat juga menambah keterbukaan dan kualitas informasi dalam sektor keuangan. Laporan keuangan perusahaan ini tentunya sangat penting untuk pengambilan keputusan para *stakeholder* seperti pemegang saham dan kreditur serta sebagai sarana pelaporan hasil kerja dari perusahaan kepada inventornya. Laporan keuangan perusahaan haruslah terhindar dari kekeliruan dan juga salah saji apalagi salah saji yang material agar keputusan yang diambil *stakeholders* dapat tepat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Audit judgment ialah pendapat atau opini auditor yang berkaitan dengan fakta serta bukti-bukti audit yang mencerminkan situasi dan keadaan keuangan perusahaan atau suatu entitas yang sesungguhnya (Fitriana, 2014). Dalam

menjalankan proses auditnya, auditor tidak hanya memeriksa kelayakan laporan keuangan suatu entitas namun juga memberikan opininya. Hasil akhir yang dikeluarkan dari proses audit berupa opini atau *judgment* sang auditor sehingga ketepatan *judgment* auditor sangatlah penting dan secara tidak langsung mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan para *stakeholder* dan mempengaruhi kualitas dari audit itu sendiri. Guna mendukung *judgment* yang dikeluarkannya, auditor melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait dalam kurun waktu yang berlainan dan mengabungkan bukti-bukti tersebut menjadi sebuah informasi (Tantra, 2013).

Opini atau *judgment* yang diberikan auditor harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa pada masa lalu, saat ini, dan saat yang akan datang (Fitriana, 2014). Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 disebutkan untuk dapat menyatakan *judgmentnya* auditor dipengaruhi oleh keraguan yang dirasakan dari diri auditor dalam hal apakah suatu entitas tetap dapat mengoperasikan bisnisnya untuk periode setahun dari tanggal laporan keuangan auditan.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *judgment* auditor yaitu berupa senioritas auditor, tindakan supervisi, dan *protegee*. Banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor seringkali dilihat dari tingkat senioritasnya dalam suatu profesi, hal ini berarti makin lama auditor berada didunia kerja makin banyak juga pengalaman serta pengetahuan yang didapatnya selama bekerja (Mulyana, 2012 dalam Agustini dan Merkusiwati, 2016). Senioritas auditor merupakan lamanya waktu serta banyaknya pengalaman juga pengetahuan auditor tersebut dalam bidang audit yang digeluti. Menurut Iyer dan Rama (2004) dalam Agustini dan Merkusiwati (2016) jika tingkat senioritas (usia, dan pengalaman) yang dimiliki klien lebih rendah dari auditor yang mengaudit laporan keuangannya, klien tersebut tidak merasa yakin dapat mempengaruhi kebijakan audit auditor, sehingga *judgment* yang diberikan dinilai lebih independen. Secara teoritis makin senior auditor makin banyak juga pengalaman serta pengetahuannya mengenai prosedur audit sehingga *judgment* yang diberikannya cenderung lebih tepat dibanding junior auditor (Fitriana, 2014). Hal ini dapat terjadi karena orang yang berpengalaman

atau sudah berulang kali melakukan audit dalam hal ini auditor senior tentunya akan lebih cepat mengetahui atau merespon terhadap suatu kejanggalan yang ada di dalam laporan keuangan suatu entitas yang diauditnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SA Seksi 311, PSA No.11 supervisi didefinisikan sebagai pengarahan upaya asisten agar *goals* dalam audit dapat tercapai serta untuk menentukan pencapaian *goals* tersebut. Supervisi biasanya dilakukan oleh manajer yang berada ditingkat lini pertama yang mana merupakan manajer yang paling sering berhadapan langsung dengan bawahannya (auditor). Dapat juga diartikan bahwa supervisi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor kepada bawahannya dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan yang sedang berjalan sehingga tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan dan jika dalam kegiatan tersebut ditemukan penyelewengan maka dapat ditentukan langkah perbaikan yang dibutuhkan.

Dalam menentukan *judgmentnya*, auditor yang belum berpengalaman membutuhkan supervisi yang mengawalinya dalam proses audit sehingga proses audit yang dijalankan berjalan baik dan hasil audit berupa *judgment* yang diberikan tepat sesuai keadaan suatu entitas yang sesungguhnya. Semakin cakap atau kompeten sang supervisor dalam bidangnya, maka ia diharapkan dapat memantau dan melatih auditor yang belum sering melakukan audit (auditor junior) dengan baik, sehingga tindakan supervisi yang dilakukan dapat memberikan pengaruh terhadap *judgment* yang diberikan oleh auditor junior (Primasari dan Azzahra, 2015). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Accounting Education Change Commission* (AECC) dalam Putri (2015), AECC mengeluarkan *issue statement* no. 4 mengenai saran yang diberikan untuk dapat memberdayakan akuntan publik yang dapat dilakukan dengan tindakan supervisi seperti memperlihatkan sikap kepemimpinan dan *mentoring*, membangun keadaan kerja yang mendorong terciptanya kesuksesan, serta menyerahkan tugas yang memacu auditor junior serta mendorong penyelesaian tugas tersebut.

Seorang auditor dalam kantor akuntan publik (KAP) memiliki rekan sejawat yang bekerja sama dengannya di dalam suatu KAP. Hubungan di antara auditor sejawat ini dinamakan hubungan *peer*. Kaplan dkk. (2001) dalam Mulia (2004)

menjelaskan hubungan *peer* ialah hubungan yang dimiliki diantara orang-orang yang berkedudukan sama. Ada dua istilah dalam hubungan *peer*, yaitu *protegee* dan *protegeer*. *Protegee* merupakan orang dalam organisasi ataupun entitas yang memiliki *protegeer* yang merupakan rekan sejawat *protegee*. Hubungan yang terjalin antara *protegee* dan *protegeer* dalam hubungan *peer* yang dimiliki auditor itu akan berdampak langsung maupun tidak dalam perilaku dan tindakan *protegee*, begitu pula dalam pemberian *judgment*. *Protegee* cenderung mengikuti arahan, masukan atau kebiasaan rekan sejawatnya yang dianggap baik dan dapat ditiru dalam dunia kerjanya yaitu dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas.

Pada era modernisasi ini, peranan auditor sebagai pihak yang independen sangat dibutuhkan untuk memeriksa kelayakan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan perusahaan. Peran auditor dapat membantu menjamin kelayakan dari laporan keuangan tahunan, sehingga dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti pemegang saham dan kreditur untuk pengambilan keputusan serta sebagai sarana pelaporan hasil kerja dari perusahaan kepada inventornya.

Dari uraian diatas, penelitian ini menguji tiga variabel independen yaitu senioritas auditor, tindakan supervisi, dan *protegee* serta variabel dependen berupa *audit judgment*. Adapun beberapa alasan yang mendasari penelitian ini, yaitu pertama tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh senioritas auditor. Penelitian yang menyatakan bahwa senioritas auditor berpengaruh terhadap *audit judgment* (Tanoto dan Suputra, 2017; Nuarsih dan Mertha, 2017; Iyer dan Rama, 2004 dalam Nuarsih dan Mertha, 2017) dan ada juga hasil penelitian yang menyebutkan senioritas auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* (Mulyana, 2012 dalam Agustini dan Merkusiwati, 2016); Agustini dan Merkusiwati, 2016; Fitriana, 2014). Kedua, kurangnya penelitian yang dilakukan mengenai tindakan supervisi dan *protegee* terhadap *audit judgment*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai tindakan supervisi dan *protegee* terhadap *audit judgment*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat, peneliti menurunkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah senioritas auditor memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya?
2. Apakah tindakan supervisi memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya?
3. Apakah *protegee* memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh senioritas auditor terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya
2. Menguji dan menganalisis pengaruh tindakan supervisi terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *protegee* terhadap *audit judgment* pada KAP di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat diharapkan membagikan manfaat bagi pihak-pihak lain, seperti :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pembanding pada penelitian yang akan datang serta menambah pengetahuan pada bidang akademik terutama mengenai pengaruh senioritas auditor, tindakan supervisi, dan *protegee* terhadap *audit judgment* yang dilakukan oleh auditor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai ada tidaknya atau

keterkaitan senioritas audit, tindakan supervisi yang dilakukan serta *protegee* terhadap *judgment* yang diberikan oleh auditor.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan dan sistematika penulisan skripsi dibahas pada bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori, penelitian yang dilakukan terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada bab ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel independen serta dependen, jenis dan sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data yang dilakukan, populasi, teknik dan penyampelan yang dilakukan, serta analisis data dibahas pada bab ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis data yang dilakukan, serta pembahasan hasil penelitian dibahas pada bab ini.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini beserta keterbatasan yang ditemui selama melakukan pengujian dan saran yang diberikan dibahas pada bab terakhir penelitian.